

IMPLEMENTASI BANTUAN DANA HIBAH DINAS SOSIAL KEPADA MASYARAKAT LANJUT USIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

Amelia Ainur Rohmah, M Zimamul Khaq

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

amelialyvy@gmail.com,

zimamulkhaq@gmail.com

Abstrak

Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini untuk meningkatkan akses lansia terhadap layanan kesehatan, memperkuat dukungan sosial, dan mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan sosial. Meskipun demikian, tantangan seperti komunikasi yang kurang efektif dan terbatasnya sumber daya menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas, perlu dilakukan peningkatan pelatihan bagi pelaksana serta pengembangan mekanisme monitoring yang transparan. Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap kebijakan sosial di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Lansia, Dana Hibah, Dinas Sosial

Abstract

This study aims to analyze the implementation of grant assistance from the East Java Provincial Social Service in improving the social welfare of the elderly. Using a descriptive qualitative research method, data were collected through in-depth interviews and documentation studies. The results of the study indicate that this program aims to increase elderly access to health services, strengthen social support, and encourage their participation in social activities. Nevertheless, challenges such as ineffective communication and limited resources pose obstacles to program implementation. To ensure sustainability and effectiveness, it is necessary to improve training for implementers and develop transparent monitoring mechanisms. This study provides insights into social policy at the local level.

Keywords: Social Welfare, Elderly, Grant Aid, Social Service



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial bagi lansia menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, terutama di provinsi dengan populasi lanjut usia yang signifikan, seperti Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai 10% dari total populasi pada tahun 2030.¹ Dalam konteks ini, perhatian terhadap kesejahteraan lansia menjadi sangat penting, mengingat mereka merupakan kelompok yang rentan dan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun sosial.

Lansia sering kali mengalami penurunan kualitas hidup akibat berbagai faktor, termasuk keterbatasan fisik, masalah kesehatan, dan kurangnya dukungan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lansia mendapatkan perlindungan sosial yang memadai dan akses terhadap layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.² Dalam upaya memenuhi kebutuhan ini, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah mengambil langkah strategis dengan memberikan bantuan dana hibah kepada lansia.

¹ Badan pusat statistic (BPS), Statistik Penduduk Lanjut Usia Di Indonesia, Jakarta (2020).

² Muhammad Akbar, Kajian Terhadap Revisi Undang Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Bantuan dana hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia melalui berbagai intervensi, termasuk penyediaan layanan kesehatan, dukungan ekonomi, dan program pemberdayaan sosial. Melalui program ini, diharapkan lansia dapat mengakses layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, implementasi program ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan dalam hal komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana hibah.³

Selain itu, dana hibah juga dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi lansia dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Keterlibatan ini penting karena interaksi sosial berperan besar dalam menjaga kesehatan mental lansia dan mengurangi risiko isolasi sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021) mencatat bahwa program bantuan sosial yang disertai dengan pendekatan partisipatif terbukti mampu meningkatkan keberfungsian sosial lansia. Dengan demikian, implementasi dana hibah tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memberdayakan lansia sebagai subjek pembangunan sosial.⁴

Dari sisi kebijakan, pelaksanaan dana hibah ini mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Regulasi ini menegaskan bahwa pemberian hibah harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Peran Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh lansia yang membutuhkan dan digunakan sesuai dengan tujuan program.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi bantuan dana hibah dari Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia di Jawa Timur?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi program bantuan dana hibah untuk lansia di Jawa Timur, dan bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi.⁶ Dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi dana hibah dari Dinas Sosial Jawa Timur kepada lansia sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan.. Penelitian ini mengambil fokus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Instansi ini dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji bagaimana program itu dijalankan.

³ Mariana Qamariah, Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu) Jurnal Respon Publik.

⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Program Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kemensos RI.

⁵ Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Alfabeta.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan sosial sebagai landasan utama untuk menganalisis implementasi bantuan dana hibah Dinas Sosial kepada lansia di Jawa Timur. Kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional yang mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Dalam konteks lansia, kesejahteraan sosial mencakup akses terhadap layanan kesehatan, dukungan sosial, rasa aman, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam Masyarakat.

Teori Kesejahteraan Sosial Menurut Ahli

Definisi kesejahteraan sosial yang relevan adalah yang dikemukakan oleh Friedlander dalam Suud (2006:8): "Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya" Definisi ini menekankan pentingnya sistem pelayanan yang terorganisasi untuk membantu individu mencapai kualitas hidup yang lebih baik.⁷

Bantuan dana hibah merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Implementasi program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar lansia, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermakna.

Dalam konteks ini, teori kesejahteraan sosial membantu menganalisis bagaimana program bantuan dana hibah tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan lansia. Evaluasi terhadap efektivitas program akan mempertimbangkan sejauh mana program tersebut mampu memenuhi kebutuhan lansia, mengurangi masalah sosial yang mereka hadapi, dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, kerangka teori ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis implementasi bantuan dana hibah dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial lansia di Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi bantuan dana hibah dari Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia di Jawa Timur

Implementasi bantuan dana hibah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial daerah yang secara khusus menysasar kelompok lanjut usia. Program ini dirancang sebagai respon atas meningkatnya jumlah lansia dengan kondisi kerentanan sosial dan ekonomi, sehingga membutuhkan intervensi negara untuk menjaga kualitas hidup dan keberfungsian sosial mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana program dan telaah dokumen

⁷ Suud, Teori Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

pelaksanaan, bantuan dana hibah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia secara terkontrol dan terarah. Dinas Sosial menempatkan program ini sebagai instrumen kebijakan sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap risiko penelantaran lansia.

Dalam praktiknya, bantuan dana hibah tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai langsung kepada lansia. Dinas Sosial memilih skema penyaluran berupa bantuan barang dan layanan, guna meminimalisasi risiko penyalahgunaan serta memastikan bantuan benar-benar digunakan untuk kepentingan lansia. Bantuan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, dukungan layanan kesehatan, serta sarana pendukung aktivitas lansia.

Selain itu, sebagian dana hibah juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial yang melibatkan lansia, seperti kegiatan pertemuan rutin, pendampingan sosial, dan aktivitas komunitas. Melalui pendekatan ini, Dinas Sosial berupaya menjaga kondisi psikososial lansia agar tetap merasa diperhatikan dan memiliki peran dalam lingkungan sosialnya.

Penetapan lansia sebagai penerima bantuan dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi yang melibatkan Dinas Sosial serta pihak terkait di tingkat lokal. Kriteria penerima bantuan ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, tingkat ketergantungan, serta kondisi kesehatan lansia. Proses ini dimaksudkan agar bantuan dana hibah dapat tepat sasaran dan menjangkau lansia yang benar-benar membutuhkan.

Peran pendamping sosial dalam tahapan ini menjadi penting, terutama dalam memastikan bahwa lansia yang terdata memang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pendamping juga berfungsi sebagai penghubung antara Dinas Sosial dan lansia penerima manfaat, khususnya dalam menyampaikan informasi terkait bantuan dan memastikan bantuan diterima dengan baik.

Proses penyaluran bantuan dana hibah dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku di Dinas Sosial. Setiap tahapan penyaluran disertai dengan proses pengawasan untuk memastikan bantuan disalurkan secara akuntabel dan transparan. Pengawasan dilakukan melalui laporan pelaksanaan program serta pemantauan langsung di lapangan oleh petugas dan pendamping sosial.

Pengawasan ini tidak hanya difokuskan pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek pemanfaatan bantuan oleh lansia. Dinas Sosial berupaya memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup lansia.

Hasil implementasi bantuan dana hibah menunjukkan adanya perubahan positif dalam kehidupan lansia penerima manfaat. Lansia yang menerima bantuan merasakan terbantunya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama terkait kebutuhan pangan dan layanan kesehatan. Selain itu, keterlibatan lansia dalam kegiatan sosial yang difasilitasi melalui program ini turut membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan interaksi sosial.

Dampak sosial dari program ini juga terlihat pada meningkatnya rasa aman lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bantuan yang diterima memberikan kepastian bahwa kebutuhan dasar mereka mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga mengurangi kecemasan lansia terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan.

Jika dianalisis menggunakan perspektif kesejahteraan sosial, implementasi bantuan dana hibah oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah mencerminkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan sosial bagi lansia. Program ini tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis lansia melalui kegiatan pendampingan dan interaksi sosial.

Namun demikian, implementasi program ini belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan jumlah pendamping serta belum meratanya jangkauan bantuan menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas program. Agar lebih selaras dengan konsep kesejahteraan sosial yang komprehensif, Dinas Sosial perlu memperkuat sistem pendampingan berkelanjutan, memperluas cakupan penerima manfaat, serta meningkatkan konsistensi pengawasan agar dampak program dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

B. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi program bantuan dana hibah untuk lansia di Jawa Timur, dan bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut

Implementasi program bantuan dana hibah menunjukkan beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah komunikasi antara Dinas Sosial, pelaksana di lapangan, dan penerima manfaat. Kurangnya sosialisasi yang jelas terkait prosedur pengajuan, penggunaan, dan pelaporan dana hibah menyebabkan sebagian lansia dan pendamping mengalami kebingungan dalam memanfaatkan bantuan secara optimal. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik membuat lansia merasa kesulitan untuk mengakses bantuan. Oleh karena itu, perlu diadakan forum pertemuan rutin yang melibatkan semua pihak terkait guna memperjelas prosedur dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Koordinasi yang tidak optimal antaraktor kebijakan sering kali menjadi hambatan dalam implementasi program kesejahteraan lansia di tingkat daerah. Ketidaksinkronan informasi dapat berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan dan kurang maksimalnya pemanfaatan dana hibah.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Jumlah pelaksana program yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah lansia penerima manfaat, sehingga pengawasan dan pendampingan belum dapat dilakukan secara maksimal. Satu pelaksana sering kali ditugaskan untuk memantau lebih dari seratus lansia, yang mengakibatkan pengawasan yang kurang optimal dan potensi kesenjangan dalam pelayanan. Pemenuhan sumber daya yang memadai sangat penting agar program ini berjalan efektif dan memberikan dampak yang nyata.

Mekanisme monitoring dan evaluasi program juga perlu diperkuat. Monitoring yang tidak terstruktur menyulitkan dalam mengukur dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan lansia. Saat ini, evaluasi hanya dilakukan setahun sekali, yang tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas program secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang lebih dinamis dan responsif.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, sejumlah langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terkait kebijakan dan kebutuhan lansia. Pelatihan ini sebaiknya mencakup area seperti manajemen program, keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang kebutuhan psikologis lansia. Kedua, penguatan sistem komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk

pemerintah daerah dan pendamping sosial. Ketiga, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan partisipatif guna mengukur dampak program secara berkala. Penggalangan umpan balik dari penerima manfaat secara reguler akan sangat membantu dalam penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program bantuan dana hibah mampu tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek lansia, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan sosial lansia yang berkelanjutan di Jawa Timur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi bantuan dana hibah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terbukti berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Bantuan ini membantu pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan akses layanan kesehatan, serta memperkuat dukungan dan partisipasi sosial lansia. Program dana hibah dengan demikian berperan sebagai instrumen kebijakan sosial daerah dalam meningkatkan kualitas hidup lansia.
2. Pelaksanaan program bantuan dana hibah masih menghadapi kendala berupa lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana, koordinasi antar pihak, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan agar program bantuan dana hibah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak kesejahteraan lansia secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program bantuan dana hibah bagi lansia.

Pertama, peningkatan komunikasi dan sosialisasi sangat penting. Dinas Sosial sebaiknya memperkuat komunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk penerima manfaat dan pendamping sosial. Pengadaan forum diskusi rutin dapat membantu memperjelas prosedur, memberikan edukasi terkait penggunaan dana, dan mengevaluasi pelaksanaan program. Dengan demikian, semua pihak akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan mekanisme program, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan yang terarah menjadi krusial. Pelaksana program perlu diperlengkapi dengan keterampilan manajerial, komunikasi, dan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan psikologis lansia. Pelatihan ini akan memberikan mereka kompetensi untuk mengelola program secara lebih efektif, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan dapat meningkat.

Ketiga, terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan program agar lebih banyak lansia yang dapat merasakan manfaatnya. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggandeng

organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas jaringan dan aksesibilitas program. Melalui kolaborasi ini, Dinas Sosial dapat lebih mudah mencapai lansia yang membutuhkan dan memastikan dana hibah disalurkan kepada mereka yang paling rentan.

Dengan melaksanakan langkah-langkah strategis ini, diharapkan program bantuan dana hibah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek lansia, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi lansia di Jawa Timur.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Statistik Penduduk Lanjut Usia di Indonesia. Jakarta: BPS.

Chansa Adhilia Dhia Feby, Strategi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Lansia, Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, Volume 1, No 8, (2025).

Evianti Kharima, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Journal Of Visions And Ideas Vol 4 No 1 (2024).

Firmansyah. (2021). HIJRAH, BETWEEN SOCIOLOGICAL AND THEOLOGICAL PHENOMENON. *Al - A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, XVIII (1), 29 - 46.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Program Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial.

Mariana Qamariah, Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu), Jurnal Respon Publik vol 14, No 4, (2020).

Muhammad Akbar, Kajian Terhadap Revisi Undang Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ritzer, G. (2014). Teori Sosiologi Modern *Pustaka Pelajar*.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Edisi Revi). *Alfabeta*.

Suharto, A. (2010). Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Suud, Teori Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Umsu,